

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Partisipasi masyarakat dalam sektor pariwisata merupakan hal penting dalam kehidupan rakyat Indonesia. Sektor pariwisata merupakan salah satu penyumbang pendapatan yang besar bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia yang turut bergabung dalam berpartisipasi di bidang pariwisata tersebut. Pemerintah Indonesia mengandalkan masyarakat untuk terlibat dalam sektor pariwisata karena dapat meningkatkan devisa negara pada penghasilan non migas serta dapat memperoleh sumbangan pada bidang-bidang strategis pembangunan nasional. Sehingga untuk menjaga pengelolaan pariwisata agar berkembang dengan baik, diperlukan adanya partisipasi pemerintah, masyarakat, maupun *stakeholder* yang terkait. Dengan demikian diperlukannya partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata.

Keuntungan dan manfaat yang diterima dari partisipasi masyarakat terutama dalam pengembangan wisata tentunya dapat dirasakan. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan dari Santosa (2011 : 34) yang mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam pengembangan wisata. Pariwisata dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, menambah pendapatan daerah serta meningkatkan devisa pemerintah. Banyaknya upaya maupun kegiatan yang ditujukan untuk mengembangkan pariwisata yang ada tentunya perlu didukung dengan partisipasi masyarakat yang aktif.

Partisipasi masyarakat dapat disebut sebagai kegiatan yang memiliki peran dalam merangkai perencanaan maupun implementasi program ataupun proses pembangunan yang merupakan keinginan dalam diri untuk bersedia sesuai kemampuan mereka dalam turut berkontribusi untuk implementasi pembangunan maupun pengembangan yang ada. Berkaitan dengan hal tersebut, Sunaryo (2013 : 3) mengemukakan bahwa masyarakat lokal dapat membangun, memiliki, dan mengelola langsung fasilitas wisata serta pelayanannya sehingga masyarakat diharapkan dapat menerima secara langsung keuntungan ekonomi serta tuntutan bagi partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi.

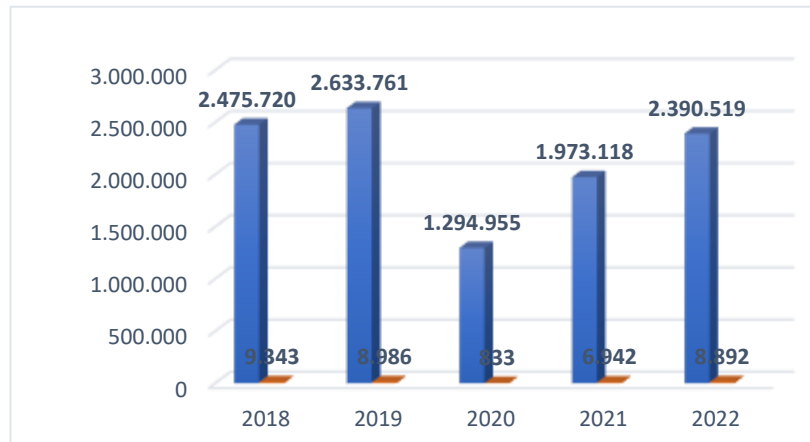
Gagasan dari masyarakat menjadi suatu hal yang penting dalam upaya pengembangan wisat. Gagasan tersebut dapat berupa cara mengatasi kekurangan dan meningkatkan kelebihan desa wisata, membangun insfrastruktur dan fasilitas, keterampilan maupun kreativitas, serta usaha-usaha yang dapat meningkatkan kualitas desa wisata. Pengembangan desa wisata yang berhasil tergantung dari sejauh mana keinginan masyarakat setempat untuk mendukung maupun berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang menunjang desa wisata itu sendiri. Masyarakat lokal akan menjadi unsur utama dalam pengembangan desa wisata, baik dari perencanaan, implementasi, hingga pemanfaatan maupun pengawasannya.

UU Desa No. 6 Tahun 2014 membahas tentang desa yang mempunyai hak asal usul dan ciri khas tradisional yang menaungi kepentingan masyarakat serta memiliki peran untuk mewujudkan kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa desa telah berkembang, maka dari itu perlu diberdayakan dan dilindungi agar menjadi desa yang mandiri, kuat, maju, dan demokratis sehingga dapat menciptakan pemerintah dan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan sejahtera.

Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi yang berpotensi, khususnya pada Kabupaten Semarang. Kabupaten Semarang memiliki kondisi wilayah berupa pegunungan dan perbukitan. Kabupaten Semarang memiliki 12 kecamatan yang terbagi menjadi beberapa obyek wisata, seperti wisata budaya/religi, wisata air, wisata rekreasi dan restoran, wisata industri, wisata alam, wisata sejarah, dan desa wisata. Desa wisata yang berada di Kabupaten Semarang merupakan salah satu jenis wisata yang dikembangkan di masing-masing desa. Kabupaten Semarang memberikan peluang potensi kepariwisataan yang dapat dijadikan tulang punggung untuk pembangunan daerah, khususnya pembangunan nasional karena memiliki sumber daya alam yang besar.

Grafik 1.1 Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Semarang



Sumber : *Website* Disporarpar Provinsi Jawa Tengah, 2022
(<https://disporapar.jatengprov.go.id/>)

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa tahun 2018 dan 2019, jumlah wisatawan yang datang ke Indonesia cenderung meningkat, begitu pun dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun, pada tahun 2020 kunjungan wisatawan menurun jauh karena pandemi Covid-19. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kunjungan pariwisata di Kabupaten Semarang sebenarnya terus meningkat karena adanya pengembangan pariwisata yang rutin dilakukan, namun hanya karena pandemi Covid-19, kunjungan wisatawan menjadi menurun,

Desa yang selama ini hanya dipandang sebelah mata, kini dapat dikatakan sebagai miniature negara yang di dalamnya terdapat aktivitas pembangunan maupun pemberdayaan sumber daya manusia. Desa wisata yang ada umumnya memiliki bentuk yang saling berkesinambungan antara akomodasi, atraksi, dan fasilitas pendukung yang dapat terintegrasi menjadi satu dari adat dan norma sosial masyarakat yang sedang berlaku. Raharjana (2018) mengemukakan pentingnya desa wisata :

“Sebuah desa bisa disebut desa wisata ialah desa yang mempunyai potensi wisata yang dapat dikembangkan. Selain untuk desa wisata dianggap

penting karena dapat meningkatkan kesejahteraan, konsep desa wisata akan menjadikan suatu desa menjaga kelestarian alam dan lingkungan, budaya, serta tradisi desa tersebut.”

Pembangunan pedesaan juga didukung oleh adanya program Nawacita Presiden Joko Widodo, yaitu pada poin ketiga yang berisi ‘Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan’. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki tingkat perekonomian masyarakat desa adalah pengembangan desa wisata.

Adanya partisipasi masyarakat membuat program atau kegiatan dalam mewujudkan desa wisata menjadi lebih baik. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah, bahwa dalam pengembangan desa wisata diperlukan kemandirian dan kesejahteraan melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, pemanfaatan sumber daya melalui penetapan kebijakan, dan pendampingan yang sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat.

Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang 2023, terdapat beberapa desa wisata di Kabupaten Semarang yang memiliki potensi lebih dibandingkan desa wisata lainnya :

Tabel 1.1 Daftar Desa Wisata di Kabupaten Semarang

No.	Nama Desa	Kriteria	Kcamatan
1.	Candi	Potensial	Bandungan
2.	Lerep	Potensial	Ungaran Barat
3.	Gogik	Potensial	Ungaran Barat
4.	Keji	Potensial	Ungaran Barat
5.	Kopeng	Potensial	Getasan
6.	Kebondowo	Potensial	Banyubiru
7.	Diwak	Potensial	Bergas
8.	Duren	Potensial	Bandungan

No.	Nama Desa	Kriteria	Kcamatan
9.	Nyatnyono	Potensial	Ungaran Barat
10.	Kupang Tanjungsari	Potensial	Ambarawa
11.	Tawang	Potensial	Susukan

Sumber : BPS Kabupaten Semarang, 2023 (<https://www.bps.go.id/>)

Kabupaten Semarang merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang memiliki banyak desa wisata. Hal ini didukung oleh luasnya yang mencapai 95.207 km² dengan total penduduk sekiranya 1.040.629 jiwa. Salah satu desa wisata yang berada di Kabupaten Semarang, yaitu Desa Wisata Lerep. Desa tersebut terdiri dari 10 RW dan 68 RT dari 8 dusun. Desa ini memiliki potensi pemandangan yang indah, seperti dengan sebagian wilayahnya yang berada di perbukitan dengan pemukiman tertinggi bernama Dusun Indrokilo dan yang terendahnya berada di Dusun Mapagan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji Desa Wisata Lerep sebagai tempat untuk meneliti mengenai tingkatan partisipasi masyarakat desa tersebut.

Setiap desa memiliki wewenang untuk mengembangkan desanya, khususnya Desa Lerep. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang. Regulasi tersebut berisikan pemberian kewenangan sepenuhnya pada Desa Lerep perihal pelaksanaan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak adat istiadat desa. Berdasarkan regulasi tersebut, tentunya telah berkesinambungan dengan kondisi saat ini maupun kondisi ke depannya untuk Desa Lerep.

Menurut Sastrodipoetro (dalam Ainur Rohman, 2009:45) partisipasi merupakan keterlibatan yang spontan beserta sifat sadar disertai dengan tanggungjawab untuk kepentingan suatu organisasi atau kelompok dengan maksud tertentu. Partisipasi yang diberikan warga Desa Lerep dalam pengembangan desa wisata tentunya sangat diperlukan. Masyarakat Desa Lerep tak hanya terlibat dalam mengelola wisatanya, mereka juga terlibat dalam pembersihan, penataan lingkungan, menerima tamu, menjual jajanan, paguyupan ojek antar jemput tamu penting, dan pengelolaan lainnya.

Kegiatan di Desa Lerep benar-benar membutuhkan partisipasi masyarakat karena kegiatan yang ada bersifat berbasis masyarakat lokal. Kegiatan tersebut membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang mumpuni agar menciptakan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan setempat.

Tabel 1.2 Mata Pencaharian Penduduk di Desa Lerep Kabupaten Semarang

No.	Mata Pencaharian	Jumlah	Presentase
1.	Belum/Tidak Bekerja	2.435	21,5%
2.	Mengurus Rumah Tangga	755	6,69%
3.	Pelajar/Mahasiswa	2.148	19,04%
4.	TNI dan Polri	73	0,64%
5.	PNS	359	3,18%
6.	Petani/Pekebun	71	0,65%
7.	Karyawan	2.492	22,09%
8.	Perdagangan	342	3,07%
9.	Buruh	790	7,09%
10.	Guru/Dosen	126	1,13%
11.	Wiraswasta	1.263	11,34%
12.	Tenaga Kesehatan	27	0,24%
13.	Lainnya	199	1,78%
Total		11.281	100%

Sumber : Website Desa Wisata Lerep, 2023 (<http://www.lerepdesawisata.com/>)

Data di atas menunjukkan bahwa Desa Lerep memiliki jumlah pedagang yang banyak dibandingkan desa-desa lainnya, yaitu sebanyak 342 orang, serta

petani/pekebun sebanyak 299 orang. Tidak dipungkiri bahwa Desa Lerep kaya akan wisata alam maupun wisata yang dibuat dengan tujuan memajukan desa. Namun, Desa Lerep masih memiliki banyak masyarakat yang tidak/belum bekerja, yaitu sebanyak 2.435 orang, sehingga dikembangkannya Desa Wisata Lerep akan menjadi lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.

Desa Wisata Lerep memiliki beberapa macam jenis wisata, seperti wisata edukasi, seperti menanam padi, pengolahan susu sapi, kopi, gula aren, beternak, dan kerajinan bambu. Adapun wisata budaya tradisional, seperti tari tradisional, gamelan, dan iriban, serta ada pula wisata yang paling digemari masyarakat, yaitu wisata kuliner dengan nama ‘Pasar Jajanan Ndeso’ yang berisi beraneka ragam makanan tradisional khas Indonesia. Pasar ini digelar dengan dibarengi oleh alunan musik jawa dan gamelan, serta terkadang disertai dengan tarian-tarian tradisional dari masyarakat Desa Wisata Lerep.

Gambar 1.1 Kondisi Wisata Kuliner Desa Wisata Lerep



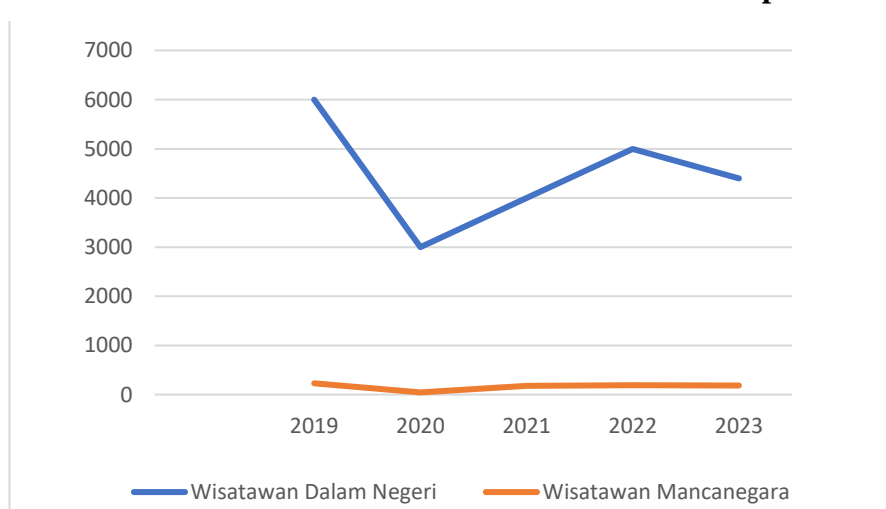
Sumber : Website Kumpulan Bisnis Semarang, 2023
(<https://semarang.bisnis.com/>)

Adanya Embung Sebligo yang menjadi daya tarik untuk para masyarakat yang gemar memancing pun disediakan di Desa Wisata Lerep ini. Selain itu,

terdapat pula beberapa paket wisata yang dipasarkan oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dengan dibantu oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Lerep. Pokdarwis ini berperan dalam mengembangkan keterlibatan, seperti masyarakat, pemerintah, maupun *stakeholders* terkait yang nantinya akan mampu menyongsong iklim kondusif untuk meningkatkan kualitas Desa Wisata Lerep.

Berbagai macam wisata yang ada diharapkan menjadi sumber pendapatan lebih bagi masyarakat karena datangnya para wisatawan tentunya membuat masyarakat Desa Lerep menerima pemasukan dan manfaat dari berbagai macam atraksi wisata yang disajikan. Namun pada kenyataannya, jumlah wisatawan Desa Wisata Lerep sempat mengalami penurunan.

Grafik 1.2 Jumlah Wisatawan Desa Wisata Lerep



Sumber : BPS Kabupaten Semarang, 2022 (<https://www.bps.go.id/>)

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa pengunjung dalam negeri di Desa Wisata Lerep cenderung tidak tetap. Tahun 2019 didatangi oleh 6.034 wisatawan. Namun pada tahun 2020, Indonesia dilanda oleh pandemi Covid-19 sehingga Desa Wisata Lerep turut terdampak. Kegiatan pariwisata maupun kuliner (Pasar Jajanan Ndeso) sempat terhenti cukup lama agar meminimalisir penyebaran. Kemudian

pada September 2020, Desa Wisata Lerep melakukan uji coba untuk membuka kembali dengan melakukan menerapkan protokol kesehatan. Namun, hasil dari kunjungan wisata tersebut hanya memperoleh 3.012 wisatawan, hal tersebut tentunya sangat berbeda jauh. Setelah Covid-19 mulai mereda pada tahun 2021, pengunjung mulai meningkat perlahan walaupun pada tahun 2023 mengalami penurunan kembali.

Menurun drastisnya kunjungan wisata di Desa Wisata Lerep didukung dengan pernyataan dari Ketua Bumdes Desa Wisata Lerep yaitu Bapak Susiyanto yang menyatakan bahwa menurunnya wisatawan ini sulit di atasi karena masih terdapat masyarakat yang tak turut berpartisipasi :

“Ungaran – ‘Sampai sekarang sebenarnya Desa Wisata Lerep ini ramai walaupun telah dilanda pandemi Covid-19, tapi jika dibandingkan pada tahun sebelum-sebelumnya sangat disayangkan bahwa wisatawannya ternyata turun drastis padahal pariwisata-pariwisata lainnya sudah ramai. Hal ini sebenarnya membutuhkan keterlibatan masyarakat dari desa kami sendiri yang sebagian lainnya itu nyatanya belum turut terlibat padahal potensi desa kami ini besar,’ Ucap Pak Susiyanto “. (kanal.id. 19/08/2022). Diakses pada Selasa 02/01/2023

Semakin berkembangnya aktivitas pariwisata di Desa Wisata Lerep tentunya dapat memdatangkan berbagai dampak maupun pengaruh yang luas baik dari dampak positif maupun negatif, terlebih untuk kondisi fisik, lingkungan, ekonomi, sosial dan budaya dari masyarakat di sekitar. Adanya desa wisata ini pun dapat membantu masyarakat setempat perihal pekerjaan, seperti membuka lapangan pekerjaan, membuka kesempatan berwirausaha, dan lain sebagainya. Hal ini pun tentunya membantu memengaruhi tingkat perekonomian Desa Lerep. Namun, walaupun potensi kepariwisataan yang terdapat di Desa Lerep terlihat

begitu banyak, masih terdapat beberapa kekurangan dalam keberjalanan partisipasi masyarakat untuk pengembangan pariwisata di Desa Wisata Lerep.

Permasalahan-permasalahan yang ada juga didukung dengan pernyataan dari Kepala Desa Lerep yaitu Bapak Sumariyadi yang menyatakan bahwa permasalahan dalam pengembangan Desa Wisata Lerep tentunya masih ada, terutama dari masyarakatnya :

“Ungaran – ‘Berbicara soal Desa Wisata Lerep, peran strategis desa ini berkontribusi besar dalam pembangunan nasional dan meningkatkan kualitas hidup warga kami. Selain menyuplai kebutuhan pangan dan kebutuhan tenaga kerja, desa juga berkontribusi terhadap perkembangan pariwisata nasional. Untuk itu, dibutuhkannya optimalisasi partisipasi dalam pengembangannya. Namun, seperti yang saya lihat tidak semua masyarakat turut terlibat. Padahal Desa Wisata Lerep ini tiap tahunnya harus mengalami pengembangan biar tidak tertinggal dengan pariwisata lainnya,’ Jelas Bapak Sumariyadi”. (masterplandes.com/01/12/2023). Diakses pada Jumat 06/01/2023.

Keterlibatan masyarakat tentunya sangat dibutuhkan dalam pengembangan Desa Wisata Lerep karena masyarakat merupakan inti dari suatu bentuk pembangunan. Masyarakat sebagai pelaku, masyarakat pula yang nantinya mendapat manfaat dari keterlibatan tersebut.

Tabel 1.3 Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Pemberian Swadaya pada Pengembangan Desa Wisata Lerep

Swadaya Masyarakat	Jumlah Masyarakat yang Terlibat			Bentuk Pemeliharaan
	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
Anggaran	13 Donatur (Rp5.678.000)	10 Donatur (Rp3.125.600)	8 Donatur (Rp2.753.079)	Uang dan Investasi
Tenaga	38 Tenaga	23 Tenaga	19 Tenaga	Tenaga fisik dan tenaga pikiran
Materi/Barang	18 Donatur	10 Donatur	8 Donatur	Perkakas pembangunan dan perabotan
Total	93	65	59	

Swadaya Masyarakat	Jumlah Masyarakat yang Terlibat			Bentuk Pemeliharaan
	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
Persentase	1,11%	0,78%	0,71%	

Sumber : Kantor Kepala Desa Lerep Ungaran, 2023

Data diatas memperlihatkan bahwa adanya swadaya berupa anggaran, mengalami penurunan setiap tahunnya yang saat ini hanya mencapai 8 donatur atau sejumlah Rp2.753.079 dana yang didonasikan masyarakat. Kemudian pada swadaya tenaga, sempat mengalami penurunan drastis pada tahun 2022 dan tetap mengalami penurunan kembali pada tahun 2023. Swadaya materi juga mengalami penurunan di tiap tahunnya hingga saat ini hanya 8 donatur. Hal tersebut patut disayangkan mengingat jumlah usia produktif masyarakat Desa Lerep mencapai 8.325 penduduk.

Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Lerep saat ini juga masih didominasi oleh orang dewasa yang mencapai lebih dari 40 orang terlibat, dibandingkan dengan masyarakat remaja yang keterlibatannya tidak mencapai 20 orang. Masyarakat remaja yang seharusnya menjadi garda terdepan demi kemajuan bangsa hanya berpartisipasi seadanya. Remaja yang berpartisipasi rata-rata hanya remaja yang masuk ke dalam pokdarwis. Padahal seharusnya, masyarakat remajalah yang menyongsong pembangunan karena masih terdapat banyak tenaga dan pikiran dengan ide-ide kreatif mereka.

Kurang optimalnya partisipasi masyarakat di Desa Wisata Lerep terlebih kurangnya partisipasi masyarakat remaja juga didukung dengan hasil penelitian dari Niken Susanawati yang berjudul Pengembangan Desa Wisata dengan *Collaborative Governance* di Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang yang menemukan bahwa :

“Masyarakat remaja justru lebih apatis dibandingkan masyarakat lainnya. Dari berbagai macam jenis wisata yang diamati dapat ditinjau bahwa masyarakat remaja yang turut berpartisipasi hanya sedikit, adanya partisipasi remaja yang ada cenderung jika hanya ada keperluan tugas sekolah maupun penelitian dari kampus saja.”

Aktivitas pada pengembangan pariwisata dapat digunakan untuk meningkatkan komunikasi, etos kerja, dan sikap kekeluargaan maupun gotong royong. Namun, nyatanya tidak semua masyarakat Desa Lerep melakukan hal tersebut karena memiliki sikap apatis dan lebih memilih untuk tidak berkontribusi dalam pengembangan Desa Wisata Lerep. Sikap apatis dari sebagian masyarakat dapat disebabkan karena adanya kesibukan tersendiri ataupun memang tidak ada keinginan untuk berpartisipasi lebih dalam mewujudkan Desa Wisata Lerep yang lebih berkembang. Terlebih masyarakat yang berusia 20 ke bawah ataupun pelajar, jarang ditemui dalam proses partisipasi dalam upaya pengembangan pariwisata Desa Wisata Lerep. Justru peran warga yang berusia 40 ke atas lebih terlihat dalam partisipasinya untuk pengembangan desa, mulai dari wisata kulinernya, alamnya, dan wisata-wisata lainnya yang terdapat di desa tersebut.

Tabel 1.4 Jumlah Masyarakat yang Turut Terlibat dalam Perencanaan dan Pengambilan Keputusan Kegiatan Pengembangan Desa Wisata Lerep

Rapat Desa Lerep	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
	Rata-Rata Jumlah Kehadiran Masyarakat	Rata-Rata Jumlah Kehadiran Masyarakat	Rata-Rata Jumlah Kehadiran Masyarakat
Rapat Pengembangan Desa Wisata Lerep	17	14	10
Total Kehadiran Masyarakat yang Wajib Hadir	85	85	85
Persentase	21%	18%	12%

Sumber : Rumah Pokdarwis Desa Wisata Lerep Ungaran, 2023

Data di atas menunjukkan bahwa masyarakat yang terlibat langsung dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait kegiatan pengembangan Desa Wisata Lerep tidak banyak jika dibandingkan jumlah keseluruhan anggota pokdarwis Desa Lerep yang berjumlah 43 orang, lalu anggota BUMDES yang terdiri dari 21 orang, struktur perangkat desa yang terdiri dari 18 orang, serta 3 perwakilan masyarakat Desa Lerep, jadi jika ditotal terdapat 85 warga yang hadir. Jumlah masyarakat yang turut berpartisipasi dalam perencanaan kegiatan pada masing-masing wisata di Desa Wisata Lerep tentunya diarahkan oleh pokdarwis. Akan tetapi, masyarakat yang berpartisipasi cenderung masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan keseluruhan warga Desa Lerep yang hanya menjadi ‘penonton’ dan bersikap pasif.

Tabel 1.5 Waktu Rapat Pembahasan Desa Wisata Lerep

Wisata di Desa Wisata Lerep	Waktu Rapat	Standar Waktu Rapat (Perdes Lerep No. 2 Tahun 2019)
Wisata Alam	1x/2 bulan	Minimal 3x pertemuan dalam 1 bulan
Wisata Kuliner	2x/bulan	
Wisata Edukasi	1x/bulan	
Wisata Air	1x/bulan	
Wisata Budaya	2x/bulan	

Sumber : Rumah Pokdarwis Desa Wisata Lerep, 2023

Data di atas menunjukkan bahwa Desa Lerep memiliki standar untuk rapat minimal tiga kali dalam sebulan. Hal ini tertuang pada Peraturan Desa Lerep Nomor 2 Tahun 2019 Bab IV Pasal 5 pada point F yang berbunyi ‘Mampu dan efektif menjalankan pertemuan desa minimal tiga kali dalam satu bulan dari masing-masing bentuk atraksi wisata’, sehingga masing-masing wisata di Desa Wisata Lerep memiliki waktu rapat yang berbeda-beda. Waktu rapat tersebut dilaksanakan sesuai jadwal yang nantinya ditetapkan. Adanya waktu rapat yang telah ditetapkan

tersebut terkadang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Terkadang rapat tersebut tidak dilaksanakan karena beberapa alasan tertentu, mulai dari kurangnya jumlah *audience* dari masyarakat, kurangnya anggota perangkat desa, pokdarwis, hingga BUMDES yang tidak lengkap, dan alasan lainnya. Rapat ini juga tergolong sangat sedikit untuk dilakukan mengingat Desa Wisata Lerep yang memiliki berbagai macam aktivitas wisata dan cakupan wilayahnya yang luas, serta belum sesuai dengan standar yang ditetapkan pada peraturan desa.

Kurangnya masyarakat dalam partisipasi Desa Wisata Lerep juga didukung oleh pernyataan dari Ketua Pokdarwis Desa Lerep yaitu Mas Daniel Bayu Anggara yang menyatakan bahwa kurang optimalnya partisipasi masyarakat ini dapat membuat masyarakat lainnya yang sebelumnya telah berpartisipasi menjadi jenuh, berikut ini :

“Ungaran – ‘Masyarakat di Desa Lerep itu banyak, namun yang berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata tentunya dapat dilihat masih sedikit. Sebenarnya mereka-mereka ini yang tidak turut berpartisipasi seringkali menganggap bahwa Desa Wisata Lerep telah baik dari segi pariwisatanya, sehingga mereka bersikap untuk tetap apatis.’ Ucap Mas Bayu”. (joglojateng.co.id. 19/05/2022). Diakses pada Jumat 02/01/2023.

Beberapa lokasi pariwisata pada Desa Wisata Lerep khususnya pada bagian wisata kuliner (Pasar Jajanan Ndeso), dianggap kurang menjaga kebersihannya karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam membersihkan daerah penjualan. Padahal Pasar Jajanan Ndeso merupakan salah satu bentuk wisata yang paling populer di antara wisata lainnya (kompasiana.com). Pasar Jajanan Ndeso yang hanya diadakan sebulan sekali pada Hari Minggu itu pun menjadikan lokasi penjualan

menjadi kotor dan banyaknya ilalang-ilalang liar yang tumbuh disekelilingnya karena tempat tersebut tidak dipakai begitu lama.

Lokasi wisata kuliner ini hanya dibersihkan beberapa hari sebelum pembukaan Pasar Jajanan Ndeso. Hal itu menyebabkan Desa Wisata Lerep yang seharusnya terlihat bersih, justru terlihat kurang terawat padahal tidak ada salahnya jika para warga rutin turut membersihkan bagian wisata kuliner tersebut walaupun belum waktunya Pasar Jajanan Ndeso dibuka agar menciptakan lingkungan yang lebih terawat.

Tabel 1.6 Jumlah Kerja Bakti Desa Wisata Lerep pada Tahun 2021 Hingga Awal Tahun 2023

Bentuk Kerja Bakti Desa Lerep	2021	2022	2023 (Januari-Juni)	Total
Masyarakat	12	12	5	34
Jasa Petugas Kebersihan	5	6	2	13
Kerjasama Masyarakat dan Petugas Kebersihan	3	4	1	8
Total Keseluruhan				55

Sumber : Kantor Kepala Desa Lerep, 2023

Data di atas memperlihatkan bahwa kerja bakti masyarakat dalam sumbangsih tenaga untuk membersihkan Desa Wisata Lerep sebanyak 34 kali atau sebulan sekali dalam setahun, kemudian desa menyewa jasa petugas kebersihan hanya 36 kali atau sekitar 2-3 bulan sekali dalam setahun, serta kolaborasi masyarakat dan petugas kebersihan hanya sebanyak 8 kali atau selama 3 bulan sekali dalam setahun. Hal ini jarang dilakukan mengingat Desa Wisata Lerep merupakan desa wisata yang besar dan seharusnya masyarakat memiliki inisiatif yang tinggi untuk membersihkan lokasi wisata-wisata yang terdapat di sana.

Paket Desa Wisata Lerep yang terdiri dari beberapa paket wisata yang sudah disusun dengan rinci sedemikian rupa pun minim peminat dari masyarakat. Masyarakat lebih condong memilih datang dan mendatangi beberapa wisata-wisata yang mereka inginkan sehingga tidak berminat menggunakan pake wisatat. Hal ini sejalan dengan masyarakat Desa Lerep yang cenderung memiliki tingkat pendidikan yang rendah, sehingga banyak masyarakat yang masih gagap teknologi untuk memasarkan produk-produk wisata di Desa Wisata Lerep. Adanya paket wisata yang sudah tersedia sebenarnya telah dipaparkan dengan baik melalui *website* resmi Desa Wisata Lerep, tetapi masih banyak wisatawan luar daerah yang belum mengetahuinya karena promosi terkait paket-paket tersebut kurang digencarkan. Hal tersebut dapat juga diakibatkan karena yang mengurus terkait paket-paket Desa Wisata Lerep hanyalah anggota Pokdarwis dan masyarakat yang cenderung tidak muda lagi.

Tabel 1.7 Rentang Waktu Promosi Paket Wisata di Desa Wisata Lerep

Paket Wisata	Platform Promosi	Waktu Promosi
Paket Wisata Rukun Santoso	Instagram (desawisatalerep)	3 bulan sekali
Paket Wisata Proklam Sokaku Asri	Instagram (desawisatalerep)	3 bulan sekali
Paket Wisata Rukun Santoso	<i>Website</i> (http://desawisatalerep.blogspot.com/)	Tidak Pernah Diperbarui
Paket Wisata Proklam Sokaku Asri	<i>Website</i> (http://desawisatalerep.blogspot.com/)	Tidak Pernah Diperbarui

Paket Wisata	Platform Promosi	Waktu Promosi
Paket Wisata Rukun Santoso	Tiktok (desawisatalerep)	4 bulan sekali / Fleksibel
Paket Wisata Proklam Sokaku Asri	Tiktok (desawisatalerep)	4 bulan sekali / Fleksibel

Sumber : Pokdarwis Desa Wisata Lerep, 2023

Kurangnya promosi paket wisata ini didukung dengan temuan dari penelitian milik Ita Nur Layyinatush Shifa dan Ilyas yang berjudul Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa yang menyatakan bahwa :

“Pariwisata-pariwisata di Desa Wisata Lerep dibuat semenarik mungkin. Namun, adanya paket wisata yang tersedia kurang dipromosikan dengan menyeluruh. Mengingat paket wisata ini sebenarnya sangat berguna untuk meningkatkan pendapatan desa karena adanya paket wisata yang beragam dan telah dijadikan satu dalam sejumlah harga.”

Permasalahan ini tentunya dapat menyebabkan wisatawan hanya mengetahui wisata-wisata yang mereka dengar dari satu orang ke orang lainnya ataupun wisata yang hanya dibicarakan di khalayak ramai, bukan beberapa pariwisata yang telah dikemas menjadi beberapa paket dan memiliki nilai jual lebih tinggi.

Adanya partisipasi dalam berbagai pelaksanaan tentunya harus dilanjutkan dengan adanya partisipasi dalam pengambilan manfaat atau keuntungan dari suatu kegiatan. Kegiatan di Desa Wisata Lerep tentunya menghasilkan keuntungan yang dapat dirasakan masyarakat, sehingga masing-masing individu yang turut terlibat dapat memanfaatkan kembali keuntungan tersebut.

Tabel 1.8 Jumlah Masyarakat yang Mengoptimalkan Kembali Hasil Desa Wisata Lerep

Kelompok Masyarakat	Jumlah Masyarakat yang Mengoptimalkan Kembali Hasil Desa Wisata Lerep (UMKM, Pembaharuan Atraksi Wisata, dsb.)		
	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Remaja	21	14	9
Dewasa	30	22	10
Lansia	11	9	4
Anak-anak	8	5	2
Jumlah	70	50	25
Rata-rata (Persentase)	0,84%	0,60%	0,30%

Sumber : Kantor BUMDES Desa Lerep, 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat beberapa masyarakat yang memanfaatkan hasil atau keuntungan dari keterlibatan mereka dalam pengembangan Desa Wisata Lerep. Pemanfaatan hasil tersebut dapat berupa peningkatan kualitas infrastruktur Desa Lerep, pembentukan UMKM, pembaharuan atraksi wisata, hingga hal-hal lainnya yang tentunya bermanfaat bagi individu tersebut. Namun setiap tahunnya, masyarakat yang memanfaatkan keuntungan secara optimal tersebut terus berkurang. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa keuntungan yang diperoleh Desa Wisata Lerep semakin berkurang dan masyarakat perlahan-lahan memiliki sikap pasif terhadap pemanfaatan hasil kegiatan Desa Wisata Lerep.

Adanya pemanfaatan hasil yang belum dilakukan secara optimal oleh masyarakat, tentunya hingga saat ini tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Lerep masih dalam kondisi yang belum baik.

Tabel 1.9 Kesejahteraan Penduduk Desa Lerep

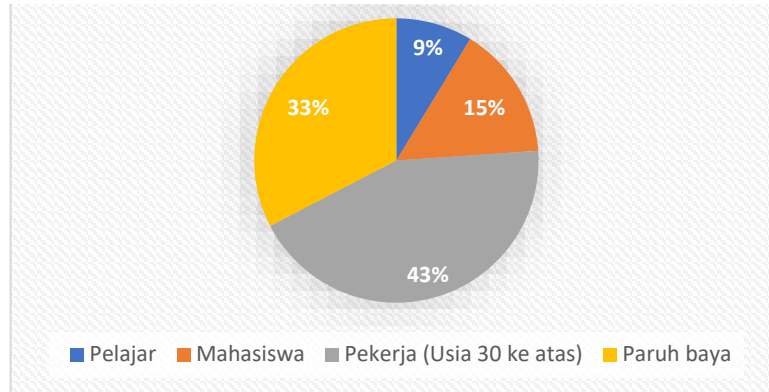
Status Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Kesejahteraan Masyarakat	Persentase
---------------------------------	---	------------

	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
Pra-Sejahtera	1.019	1.028	1.040	Naik 1,15%
Sejahtera	3.118	3.109	3.107	Turun 0,35%
Sejahtera-Plus	71	69	63	Turun 7,8%

Sumber : BPS Kabupaten Semarang, 2023

Data di atas menunjukkan bahwa masyarakat Desa Lerep masih didominasi oleh masyarakat sejahtera, yaitu masyarakat yang hanya dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan pendidikan, namun kesejahteraan tersebut terus mengalami penurunan di tiap tahunnya. Masyarakat pra-sejahtera menduduki lebih dari 1.000 penduduk dan terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Sedangkan masyarakat sejahtera-plus atau masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhannya di atas kebutuhan sehari-hari saat ini juga mengalami penurunan di tiap tahunnya dan hanya berjumlah 63 orang. Padahal seharusnya jika masyarakat berpartisipasi pada proses pengembangan Desa Wisata Lerep secara optimal, tentunya tingkat perekonomian akan meningkat dan Desa Wisata Lerep akan memiliki kualitas yang semakin baik ke depannya.

Grafik 1.3 Jumlah Masyarakat yang Belum Mengetahui Keberadaan Desa Wisata Lerep



Sumber : Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Pariwisata di Desa Wisata Lerep Kabupaten Semarang (unpad.ac.id, 2022)

Desa Wisata Lerep merupakan salah satu desa dengan pengunjung terbanyak dibandingkan desa wisata lainnya di Kabupaten Semarang, tetapi berdasarkan data di atas masih banyak masyarakat Kabupaten Semarang yang nyatanya belum mengetahui keberadaan Desa Wisata Lerep. Hal ini merupakan bentuk hasil dari partisipasi masyarakat yang kurang optimal. Adanya masyarakat yang belum mengetahui ini tentunya menyebabkan mereka belum pernah pula untuk datang ke Desa Wisata Lerep. Adanya Masyarakat yang mengetahui cenderung jika hanya ada kegiatan pariwisata bersama warga perumahannya, sekolah, maupun penelitian-penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa maupun penelitian-penelitian lainnya. Hal ini dapat disebabkan karena kurangnya partisipasi masyarakat Desa Wisata Lerep itu sendiri dalam mengembangkan promosi maupun mengoptimalkan kegiatan-kegiatan yang membuat masyarakat luar tertarik akan wisata di Desa Wisara Lerep. Hal ini diperlukannya perbaikan maupun kritikan dari berbagai pihak, terlebih dari masyarakat Desa Lerep itu sendiri dalam memastikan wisatanya dapat dikenal orang luar.

Adanya proses dalam tiap kegiatan di Desa Wisata Lerep tentunya membutuhkan keterlibatan masyarakat Desa Lerep dalam memberikan kritikan maupun penilaian dalam keberjalanan pengembangan Desa Wisata Lerep. Masyarakat Desa Lerep tentunya diberikan wadah oleh perangkat desa dalam memberikan penilaiannya dalam bentuk tulisan maupun penilaian secara langsung.

Tabel 1.10 Jumlah Masyarakat dalam Memberikan Penilaian terhadap Proses Pengembangan Desa Wisata Lerep

Kelompok Masyarakat	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
	Sosial Media	Kotak Saran	Formulir Online	Sosial Media	Kotak Saran	Formulir Online	Sosial Media	Kotak Saran	Formulir Online
Remaja	21	13	34	16	10	21	4	6	13
Dewasa	36	26	56	20	7	33	9	13	19
Paruh baya	9	16	12	8	13	8	3	11	5
Anak-anak	-	7	12	-	5	9	-	4	5
Total	66	62	114	44	35	71	16	34	30
Persentase	058%	0,54%	1,01%	0,39%	0,31%	0,62%	0,14%	0,30%	0,26%

Sumber : Kantor Kepala Desa Lerep Ungaran, 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa masyarakat dapat memberikan penilaian atas adanya proses pengembangan Desa Wisata Lerep, khususnya pada program-program pada atraksi wisata yang dilaksanakan. Penilaian tersebut dapat dilakukan melalui sosial media Desa Wisata Lerep, kotak saran yang disediakan di depan kantor kepala desa, serta formulir online yang disebarakan melalui *Whatsapp Group* Desa Lerep. Berbagai kalangan masyarakat mulai dari anak-anak hingga paruh baya diberikan kesempatan yang sama dalam memberikan penilaiannya karena kelompok-kelompok tersebut masuk ke dalam pihak-pihak yang turut terlibat dalam pengembangan Desa Wisata Lerep.

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa jumlah tiap kelompok masyarakat tiap tahunnya mengalami penurunan dalam memberikan kritikan, sementara itu adanya kritikan atau penilaian dari masyarakat sebenarnya dapat

membangun kualitas dari pengembangan Desa Wisata Lerep, terlebih meningkatkan kualitas dari program yang diadakan dan meningkatkan kualitas kinerja organisasi-organisasi yang terdapat di desa, seperti perangkat desa, Pokdarwis, dan BUMDES.

Partisipasi masyarakat di Desa Wisata Lerep juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor internal dan eksternal. Semakin banyak rakyat yang berpartisipasi, bersikap tidak apatis, serta adanya bantuan dari berbagai pihak, semakin terbantu pula kegiatan pengembangan desa wisata dan semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat setempat.

Adanya partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Lerep mempunyai sifat penting sebagai alat untuk memperoleh informasi mengenai situasi dan kondisi, serta kebutuhan dan sikap masyarakat setempat yang tanpa keterlibatannya program pengembangan akan gagal. Partisipasi masyarakat yang berjalan dengan baik tentunya akan membuat masyarakat mempercayai program-program pengembangan jika mereka dilibatkan dalam proses partisipasi tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, diperlukannya pelaksanaan kajian tentang partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Lerep. Beberapa masalah yang terdapat pastinya dapat terselesaikan apabila masyarakat yang ada tidak apatis maupun pasif. Sehingga berdasarkan latar belakang yang berisikan kondisi partisipasi masyarakat Desa Wisata Lerep, penulis memiliki ketertarikan untuk menelitinya dengan lebih dalam.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas mengenai partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Lerep Ungaran Kabupaten Semarang, dapat diketahui bahwa masih terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya yang diidentifikasi sebagai berikut :

1. Belum optimalnya keterlibatan masyarakat untuk memberikan kontribusi dalam rapat perencanaan kegiatan pengembangan Desa Wisata Lerep.
2. Kurangnya sumbangsih swadaya masyarakat berupa tenaga dan materi dalam mengembangkan wisata yang terdapat di Desa Wisata Lerep.
3. Kontribusi masyarakat belum maksimal dalam memanfaatkan hasil pengembangan Desa Wisata Lerep untuk meningkatkan kesejahteraan desa.
4. Kurang optimalnya masyarakat dalam memberikan penilaian yang membangun mengenai pembangunan wisata di Desa Wisata Lerep.
5. Menurunnya jumlah wisatawan di Desa Wisata Lerep tiap tahunnya.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, rumusan masalah partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Lerep Ungaran Kabupaten Semarang adalah :

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Lerep Ungaran?
2. Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Lerep Ungaran?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Lerep Ungaran Kabupaten Semarang adalah :

1. Menganalisis partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Lerep Ungaran.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Lerep Ungaran.

1.5. Kegunaan Penelitian

1.5.1. Kegunaan Teoritis

Pelaksanaan penelitian diharapkan mampu mendatangkan manfaat berupa ilmu pengetahuan, khususnya segi pengetahuan yang membahas mengenai identifikasi partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata, terlebih partisipasi masyarakat yang dilakukan dalam upaya pembangunan maupun pengembangan Desa Wisata Lerep. Dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh informasi empiris berdasarkan pijakan teori yang mendukung terhadap partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata Desa. Dengan adanya pelaksanaan penelitian ini pun dapat membantu peneliti-peneliti yang akan datang jikalau ingin meneliti mengenai gagasan yang sama maupun lokus yang sama.

1.5.2. Kegunaan Praktis

- a) Bagi Pemerintah

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Semarang dalam upaya

pengembangan desa wisata, serta menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Semarang dalam membuat dan mengkaji kebijakan yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata.

b) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan kesadaran masyarakat desa untuk turut berpartisipasi dalam pengembangan Desa Wisata Lerep agar tidak lagi apatis dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Lerep.

c) Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini diharapkan penulis dapat mengaplikasikan ilmu atau wawasan yang didapatkan ke dalam kerja nyata dan dapat menambah pengetahuan serta wawasan penulis mengenai partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata.

1.6. Tinjauan Pustaka

1.6.1. Penelitian Terdahulu

Mengacu pada berbagai literatur dari penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan latar belakang pada penelitian ini yaitu mengenai peran dan penanganan pengaduan. Literatur yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Penelitian dilakukan oleh Eva Rachmawati, Syafitri Hidayati, dan Tri Rahayuningsih (2021) mengenai *Community Involvement and Social Empowerment in Tourism Development* yang memiliki hasil penelitian

bahwa partisipasi masyarakat dalam industri pariwisata dan proses pengambilan keputusan dapat meningkatkan persepsi akan pemberdayaan sosial, sehingga mayoritas masyarakat memiliki persepsi positif terkait pemberdayaan sosial. Adanya partisipasi masyarakat yang kuat pada pengembangan pariwisata ini memiliki dampak baik bahwa masyarakat merasakan bahwa aspirasinya lebih di dengar dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pengembangan wisata.

2. Penelitian dilakukan Rifki Rahmanda Putra, Ute Lies Siti Khadijah, Ucu Cecep dkk. (2021) yang membahas mengenai *Development of community-Participation: Study in Kertayasa Village, Pangandaran District, West Java*. Pengembangan Desa Wisata Kertayasa didasari dari unsur atraksi, amenitas, aksesibilitas, dan *ancillary services* yang didominasi oleh peran masyarakat. Pola pengembangannya adalah model gugusan daya tarik wisata (Green Canyon) yang menstimulus perkembangan desa di sekitarnya. Konsep pengembangannya adalah *bottom up* dengan prioritas pemberdayaan masyarakat di bidang lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya sehingga masyarakat dapat menerima manfaat secara merata dari adanya partisipasi tersebut. Hal itu pun untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan.
3. Penelitian dilakukan oleh Mingsen Wang, Jinbo Jiang, Sonjun Xu, dkk. (2021) yang meneliti tentang *Support for Tourism Development in Ancient Villages: The Mediating Role of Perceptions of Conflicts in the Tourism Community*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat

dalam pengembangan pariwisata memiliki pengaruh positif. Adanya partisipasi yang masif di Desa Whampo China ini menyebabkan berkurangnya konflik yang terjadi di desa tersebut sehingga dapat memperkuat solidaritas antar warga.

4. Penelitian dilakukan oleh Felix Bello (2021) yang membahas tentang *Community Participation in Tourism Planning at Majete Wildlife Reserve, Malawi*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Cagar Alam Majete memiliki sistem yang memungkinkan adanya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dengan sumber daya lainnya yang berkomitmen untuk mendukung proses tersebut. Masyarakat diwakili oleh organisasi independen dan pemimpin adat selama proses perencanaan, tetapi masyarakat memiliki akses yang terbatas ke informasi pariwisata dan ahli perencanaan pariwisata. Cagar Alam Majete juga tidak memiliki struktur muusyawarah yang tepat untuk memfasilitasi aliran keputusan pengelolaan yang efisien kepada masyarakat lokal.
5. Penelitian dilakukan oleh Maya Sajidah Salsabila dan Agus Machfud Fauzi (2021) mengenai Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Kasus Desa Menang Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri). Penelitian mengungkapkan bahwa dalam proses pengembangan Desa Wisata Menang, terdapat partisipasi masyarakat dalam bentuk ide, tenaga, dan kreativitas. Hal ini dilakukan masyarakat untuk bergotong royong mengembangkan desa wisata belimbing wuluh dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat.

6. Penelitian dilakukan oleh Ade Arqam Hidayat (2022) yang meneliti tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Wates Jaya di Kampung Lengkong, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Wates masih sangat rendah, hal terlihat dari partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan mengevaluasi. Ada faktor pendukung, seperti sumber daya alam, kesadaran pengelola, umur, lama tinggal, dan peran stakeholders. Faktor penghambatnya yaitu pendidikan, kurangnya motivasi, pekerjaan, dan komunikasi.
7. Penelitian ini dilakukan oleh Ita Nur Layyinatush Shifa dan Ilyas (2023) yang membahas tentang Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa. Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat BUMDES dilakukan melalui program pariwisata, dalam pemanfaatan sumber alam sebagai tempat wisata, pemanfaat rumah warga sebagai *homestay*, dengan target peningkatan pendapatan warga dan perbaikan lingkungan fisik daerah. Adanya BUMDES ini tentunya dibantu dengan partisipasi masyarakat, terlebih pada tahap partisipasi dalam pengambilan manfaat dan partisipasi dalam evaluasi program pemberdayaan.
8. Penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah, Arif Budiman, dan Adilansyah (2023) yang meneliti tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) dikategorikan berpartisipasi aktif, baik itu lewat saran dan tenaga yang disumbangkan oleh masyarakat ataupun dari bentuk aspirasi berupa ide inovatif yang diberikan, walaupun tidak semua ikut terlibat dalam pelaksanaan.

9. Penelitian dilakukan oleh Marningot Tua Natalis Sitomurang (2023) mengenai Partisipasi Masyarakat Dusun Cemare dalam Pengelolaan Kawasan Ekowisata Lembar Selatan. Partisipasi masyarakat Dusun Cemare dalam pengelolaan kawasan ekowisata mangrove lembar selatan sudah baik dengan terlibat dari awal pengambilan keputusan hingga evaluasi. Pengelolaan wisata ini berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat dengan membuka lapangan kerja baru bagi warga dusun sehingga mampu mengurangi jumlah warga yang beralih pergi keluar daerah.
10. Penelitian dilakukan oleh Ana, Sri Maryani, dan Agus Eka (2023) yang membahas tentang Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam musrenbangdes di Desa Sekura masih rendah. Warga yang hadir cenderung minim menyumbang gagasan tentang pembangunan desa. Peneliti merekomendasikan kepada Pemerintah Desa Sekura untuk lebih aktif dalam melibatkan warga masyarakat musrenbangdes.

Penelitian terdahulu yang dilakukan berbagai peneliti di atas memiliki kontribusi dalam memengaruhi penelitian yang dilakukan penulis saat ini.

Penelitian terdahulu yang berfokus pada partisipasi masyarakat untuk mengembangkan pariwisata di lingkungan tempat tinggal mereka maupun di suatu desa/kota mereka memberikan pengetahuan hingga wawasan yang luas terhadap penelitian saat ini yang juga berfokus pada partisipasi masyarakat akan pengembangan pariwisata di Desa Wisata Lerep.

Penelitian yang dilakukan penulis saat ini tentunya berbeda dengan penelitian-penelitian diatas, dimana terdapat *Gap Research* antara penelitian terdahulu dan penelitian saat ini. Penelitian-penelitian terdahulu cenderung diteliti di daerah yang sudah 'besar', sedangkan penelitian ini dilakukan di Ungaran, Kabupaten Semarang dengan menganalisis partisipasi masyarakat yang dilakukan dalam upaya pengembangan Desa Wisata Lerep. Teori yang digunakan pada penelitian kali ini dan penelitian terdahulu tentunya berbeda. Penelitian terdahulu mayoritas hanya menggunakan teori partisipasi dengan satu hingga tiga gejala saja, sedangkan pada penelitian ini menggunakan teori dari Josef Riwu Kaho yang memaknai bahwa partisipasi masyarakat dapat digolongkan menjadi beberapa proses partisipasi dengan masing-masing gejala di tiap proses tersebut, mulai pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pengambilan manfaat, dan partisipasi dalam evaluasi. Peneliti saat ini juga meneliti faktor-faktor yang memengaruhi adanya partisipasi tersebut, sehingga fenomena maupun konsep yang belum ada maupun belum terselesaikan di penelitian sebelumnya dapat terjawab pada penelitian ini.

1.6.2. Administrasi Publik

Makna etimologis, administrasi dapat dikatakan sebagai kegiatan pengelolaan informasi, manusia, harta, benda, untuk mencapai tujuan dalam organisasi. Jika diartikan secara sempit, administrasi ialah susunan maupun pencatatan dan informasi data sistematis dengan tujuan memudahkan memperolehnya kembali. Menurut arti luasnya, istilah administrasi berkaitan dengan aktivitas kolaborasi manusia ataupun sekelompok hingga mencapai tujuan yang diinginkan, tetapi tidak semua aktivitas yang dilakukan manusia maupun sekelompok orang dapat dikatakan sebagai administrasi.

Administrasi publik adalah langkah memberdayakan sumber daya manusia secara koordinatif dan terorganisir untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan melakukan pengelolaan terhadap suatu keputusan dalam kebijakan publik (Chandler & Plano, 2014). Pendapat lain dikemukakan oleh Jhon M. Pfiffner dan Robert V. Prethus (2006:23-24) dalam Inu Kencana Syafie yang menyatakan bahwa administrasi publik merupakan implikasi kebijakan dari pemerintah yang sudah diamanahkan oleh badan perwakilan politik.

Beberapa pengertian yang dikemukakan para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa arti dari administrasi publik itu sendiri ialah merupakan aktivitas kolaborasi maupun kerjasama yang dilakukan organisasi pemerintahan yang sifatnya resmi dengan tujuan untuk menjalankan kewajiban maupun tugas sebagai seorang birokrat yang memberikan pelayanan publik. Administrasi publik pun merupakan upaya yang dilaksanakan pemerintah (legislative, eksekutif,

dan yudikatif) dalam merespon isu-isu yang berada di kalangan publik hingga terbentuklah suatu kebijakan yang disusun dan nantinya diimplementasikan.

1.6.3. Paradigma Administrasi Publik

Nicholas Henry (dalam Pasolong, 2014) menyatakan bahwa suatu standar disiplin ilmu menaungi fokus (metode ilmiah yang dipakai dalam memecahkan suatu masalah), serta lokus (lokasi dimana metode itu dipakai maupun diterapkan), yaitu sebagai berikut :

- **Paradigma pertama** atau paradigma dikotomi Politik administrasi dari tahun 1900-1926. Paradigma ini memfokuskan pada pemisahan urusan politik dan urusan administrasi di dalam fungsi utama pemerintahan. Paradigma ini menekankan pada penekanan bahwa urusan politik berkaitan dengan masalah-masalah pemerintahan, politik, serta kebijakan, sedangkan urusan administrasi memiliki fokus terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan organisasi, kepegawaian, penyusunan anggaran di dalam sebuah birokrasi.
- **Paradigma kedua** pada tahun 1927-1937 muncul prinsip untuk yang mengembangkan prinsip-prinsip administrasi negara, bahwa terdapat perkembangan baru dalam administrasi negara dan mencapai puncak reputasinya. Sekitar tahun 1930-an administrasi negara banyak mendapat masukan dari bidang lain seperti industrial dan pemerintahan.
- **Paradigma ketiga** adalah penjelasan mengenai administrasi negara sebagai ilmu politik yang berkembang pada tahun 1950-1970. Fase ini berusaha untuk menetapkan kembali hubungan konseptual antara administrasi negara dengan ilmu politik. Hal tersebut didasari pada ruang lingkup administrasi negara yang

pada dasarnya adalah kekuasaan baik kepada administrasi negara itu sendiri maupun kepada masyarakat.

- **Paradigma keempat** pada periode 1956-1970 adalah masa administrasi negara sebagai ilmu administrasi. Prinsip manajemen dikembangkan kembali secara ilmiah dan mendalam seperti perilaku organisasi, analisis manajemen, penerapan teknologi modern. Pada periode paradigma ini keorganisasian berkembang sangat pesat serta melibatkan peran para ilmuwan dalam menganalisa bentuk negara dimana mereka mulai berfikir secara filosofis mengenai makna dari sebuah negara.
- **Paradigma kelima** berkembang sejak 1970 yang menempatkan administrasi negara sebagai administrasi negara. Pengembangan administrasi negara tidak hanya ditujukan pada *locus* administrasi negara sebagai ilmu murni, tetapi juga pengembangan teori organisasi.
- **Paradigma keenam** yang berkembang sejak 1997 menempatkan administrasi publik sebagai Administrasi Publik Baru atau *Governance*. Paradigma ini memfokuskan pada usaha pengorganisasian, penggambaran, atau pembuatan sebuah organisasi yang di dalamnya terkandung nilai-nilai kemanusiaan yang dikembangkan bersamaan sebuah sistem yang demokratis serta lebih responsif dan melibatkan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan beberapa paradigma yang sudah dipaparkan di atas, dalam penelitian ini Paradigma Administrasi Publik yang berkaitan ialah Paradigma Administrasi publik ke-6 yaitu administrasi publik sebagai administrasi publik baru atau *governance*, dimana fokus dan lokusnya telah dijelaskan dengan rinci,

seperti fokusnya pada analisis partisipasi masyarakat yang akan dikaji bagaimana upaya pengembangan pariwisata yang mereka lakukan dengan didasari oleh beberapa teori yang relevan, sedangkan lokusnya berada di suatu lokasi penelitian yang menjadi basis permasalahan penelitian, yaitu di Desa Wisata Lerep. Paradigma *governance* ini pun mengutamakan kepentingan rakyat dengan didasari dengan suatu pengorganisasian yang terstruktur dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam programnya. Masyarakat memiliki posisi sebagai ‘pemilik pemerintahan’ atau yang biasa disebut *owners of government* yang sepatutnya mampu melakukan kegiatan bersamaan demi kepentingan sesuatu yang lebih baik. Keterlibatan publik dapat menjadi suatu dialog kepada pemerintah untuk mencapai nilai dan kepentingan bersama, bukan lagi sebagai agregasi akan kepentingan pribadi.

1.6.4. Manajemen Publik

Sejak dahulu kala, manajemen sudah ada untuk mengelola maupun memenuhi kebutuhan dengan adanya bantuan orang lain. Sehingga dalam seluruh kegiatan manusia dalam bekerja, bersekolah, berumah tangga, pemerintahan sekali pun, terdapat proses manajemen di dalamnya.

Mary Parker Follett (dalam Wilujeng, 2007:3) menyatakan bahwa manajemen merupakan cara untuk menuntaskan pekerjaan melalui orang lain. Arti tersebut mengandung maksud bahwa untuk mencapai tujuan organisasi, manajer memiliki peraturan untuk mengatur orang lain agar proses manajemen yang terjadi terlaksana agar tugas yang dilakukan dapat dikerjakan bersama.

Menurut Nor Ghofur (2014) mengemukakan bahwa manajemen publik adalah manajemen pemerintah, yang artinya manajemen publik juga bermaksud untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengontrolan terhadap pelayanan kepada masyarakat.

Penyampaian di atas dapat diberikan simpulan bahwa arti manajemen memiliki acuan pada proses untuk mengkoordinir dan mengintegrasikan aktivitas-aktivitas pekerjaan agar dapat selesai secara efektif efisien melalui orang lain sehingga manajemen publik dapat dimaknai sebagai kinerja yang kompleks dari aktor yang terlibat di dalamnya, yaitu pemerintah atau masyarakat.

Sebenarnya konsep partisipasi itu mempunyai makna yang beragam dan luas. Garis besarnya, partisipasi merupakan bentuk perwujudan dari peran maupun contoh nyata masyarakat dalam melakukan kegiatan, seperti perencanaan maupun pelaksanaan demi menggapai tujuan pembangunan masyarakat. Partisipasi tersebut dapat dijumpai secara beragam, seperti jasa, saran, maupun bentuk materi dan tenaga/pikiran secara langsung dan tidak langsung yang bersifat demokratis.

1.6.5. Manajemen Partisipatif

Richard L. Daft (2017: 8) mendefinisikan manajemen adalah pencapaian sasaran-sasaran tertentu dengan cara yang efektif dan efisien melalui perencanaan pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian sumberdaya organisasi. Menurut James A.F. Stoner (2006) manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya dari

individu atau organisasi serta penggunaan sumber daya yang ada pada organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Bedjo (2015: 3) partisipasi adalah perilaku yang memberikan pemikiran terhadap sesuatu atau seseorang. Pengertian lain tentang partisipasi juga dikemukakan oleh Slameto (2011: 14) yang mengatakan bahwa partisipasi adalah pemusatan energi yang tertuju pada suatu obyek dan juga meliputi banyak sedikitnya kesadaran yang menyertai sesuatu aktivitas yang sedang dilakukan. Secara umum, partisipasi diartikan sebagai keterlibatan suatu komponen dalam memberikan kontribusi untuk mencapai tujuan.

Manajemen tentunya berhubungan dengan partisipasi yang dilakukan masing-masing individu ataupun organisasi karena di dalam adanya suatu upaya partisipasi, terdapat pengelolaan atau perlakuan manajemen yang baik sehingga lahirlah manajemen partisipatif (Branch, 2016 : 158). Menurut Allport (dalam Yohe, 2011), manajemen partisipatif adalah pendekatan dalam menjalankan tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui komunikasi interaktif dan aktivitas langsung, sehingga terbangun pengertian dan kepercayaan antar masyarakat.

1.6.6. Partisipasi Masyarakat

Dalam bahasa Inggris, partisipasi berarti 'participations' yang memiliki arti yaitu mengambil bagian. Perwujudan dengan terlibatnya manusia disertai dengan mental maupun perasaan untuk tujuan tertentu demi kepentingan suatu

kelompok dengan penuh tanggungjawab terhadap targetnya dapat disebut dengan partisipasi pula.

Mikkelsen (dalam I Nyoman Sumaryadi, 2013:48) mengemukakan bahwa konsep partisipatoris pembangunan dapat dimulai dengan masyarakat yang benar-benar mengetahui mengenai sistem kehidupan mereka sendiri. Konsep ini pun seharusnya dapat memberikan nilai maupun pengembangan pengetahuan serta ketrampilan mereka, hingga dapat mendatangkan sarana yang diperlukan mereka agar selalu bisa mengembangkan diri masing-masing.

Pendapat lain dari Dewi, Fandeli, & Baiquni (2013) juga mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat dapat disebut sebagai hak yang seharusnya dipunyai masing-masing orang untuk turut serta dalam penyusunan program maupun pengambilan keputusan terkait pembangunan maupun pengembangan daerah, pengawasan, dan evaluasi program yang telah terlaksana. Masyarakat tak hanya berperan sebagai sekelompok manusia yang menerima fasilitas dari adanya program, namun mereka juga turut andi dalam keberjalanan program tersebut.

(Keith Davis, 2007) mengklasifikasikan beberapa gejala dari partisipasi yang dilakukan masyarakat, yaitu :

a. Partisipasi Uang

Menurut (Keith Davis, 2007) Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan.

b. Partisipasi Harta Benda

Menurut (Keith Davis, 2007) partisipasi harta benda adalah bentuk partisipasi yang berupa sumbangan harta benda, biasanya berupa alat-alat atau perkakas. Partisipasi ini biasanya dihibau dari masyarakat itu sendiri.

c. Partisipasi Tenaga

Menurut (Keith Davis, 2007) partisipasi tenaga adalah bentuk partisipasi yang berupa usaha menggunakan tenaga fisik atau diri sendiri untuk membantu keberhasilan suatu program. Partisipasi ini bersifat langsung dengan memberikan tenaganya berupa fisik kepada program yang ingin dikerjakan.

d. Partisipasi Keterampilan atau Keahlian

Menurut (Keith Davis, 2007) partisipasi keterampilan adalah bentuk partisipasi yang berupa sumbangan keterampilan dan keahlian yang dimiliki seseorang. Partisipasi ini menjadi unsur yang paling diinginkan dan diharapkan dengan maksud agar orang tersebut dapat melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya dan untuk mendorong aneka ragam bentuk upaya pengembangan.

e. Partisipasi Pikiran

Menurut (Keith Davis, 2007) partisipasi pikiran adalah bentuk partisipasi yang berupa ide atau gagasan pikiran yang dikemukakan baik oleh individu maupun kelompok yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang

diharapkan. Berupa sumbangan ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya yang diberikan partisipan pada pertemuan atau rapat.

Josef Riwu Kaho (2007) juga mengemukakan beberapa gejala dari partisipasi masyarakat. Josef mengemukakan gejala dari partisipasi masyarakat ialah suatu proses yang dilakukan sejak awal program hingga akhir ataupun hingga tahap evaluasi, yaitu:

a. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

Menurut Josef Riwu Kaho (2007), partisipasi dalam pengambilan keputusan adalah kontribusi masyarakat terhadap suatu kegiatan maupun program tertentu dengan proses pengambilan keputusan atau menggunakan hak aspirasi mereka demi kelangsungan kegiatan dan program yang sesuai harapan. Masyarakat juga memiliki andil dan berhak untuk menyampaikan gagasan yang menyangkut kepentingan bersama sehingga terbentuklah kesepakatan.

Masyarakat juga perlu untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam bentuk saran untuk pengembangan program. Partisipasi dalam tahap ini juga digambarkan dengan kehadiran rapat, diskusi, tanya jawab, mengemukakan pendapat, bertukar pikiran, melakukan penolakan terhadap program yang ditawarkan dan lain-lain.

Josef Riwu (dalam Ani, 2010) di penelitian yang berjudul Tingkat Partisipasi Masyarakat Pasca Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan Kecamatan Jombang Kota Cilegon, mengemukakan bahwa partisipasi dalam pengambilan keputusan ini dapat dilihat melalui aspirasi yang diberikan masyarakat untuk membuat keputusan yang menyangkut nasib mereka, serta menilai kehadiran masyarakat dalam acara pertemuan atau rapat-rapat di desa karena kehadiran masyarakat dalam menyumbang pikiran saat pertemuan desa begitu penting.

Penelitian yang berjudul 'Kepemimpinan Kepala Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Kaseralau Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang' juga menguraikan pendapat menurut Josef Riwu (dalam Nurhidayah, 2018) bahwa pengambilan keputusan dalam partisipasi dapat ditinjau dari keterlibatan masyarakat dalam menetapkan skala prioritas atas rencana pengembangan Desa. Skala prioritas yang dilakukan masyarakat dapat menjadi tolok ukur kemampuan masyarakat dalam mengambil keputusan yang lebih penting sebagai titik awal suatu pembangunan.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa gejala dari Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan yaitu keikutsertaan masyarakat dalam memberikan aspirasi, tingkatan kehadiran masyarakat dalam pertemuan/rapat desa, dan tingkat kemampuan masyarakat dalam menetapkan skala prioritas.

a. Partisipasi dalam Pelaksanaan

Menurut Josef Riwu Kaho (2007), partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program merupakan lanjutan dari rencana atau kebijakan yang telah disepakati sebelumnya baik berkaitan dengan perencanaan dan tujuan yang akan dicapai. Hal ini dapat digambarkan melalui keikutsertaan masyarakat dalam memberikan kontribusi guna menunjang pelaksanaan kegiatan yang dapat berwujud tenaga, harta benda/uang, keahlian/keterampilan, ide dan gagasan maupun informasi yang berguna bagi pelaksanaan kegiatan.

Josef Riwu (dalam Adam, Irwan, dkk, 2019) berpendapat dalam penelitian yang berjudul Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang bahwa partisipasi masyarakat sangat penting terlebih pada tahap implementasi atau pelaksanaan program desa. Sehingga Partisipasi dalam pelaksanaan ini dapat diamati melalui keikutsertaan masyarakat dalam memberikan kontribusi langsung maupun tidak langsung, guna menunjang pelaksanaan pembangunan sesuai tujuan dan target pembangunan dan program yang sedang dilaksanakan.

Josef juga mengemukakan gejala Partisipasi dalam Pelaksanaan dalam penelitian di atas, bahwa partisipasi dalam Pelaksanaan dapat dilihat dari pemeliharaan pembangunan maupun program yang telah berhasil dilaksanakan. Adanya pemeliharaan pembangunan maupun program hingga

saat ini dapat memberikan penilaian bahwa partisipasi dalam pelaksanaan yang dilakukan oleh masyarakat cenderung terlihat secara nyata.

Penelitian lainnya juga menguraikan pendapat dari Josef Riwu (dalam Welasari & Ardiensyah, 2015) dengan judul penelitian Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Makeruh Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis bahwa partisipasi dalam pelaksanaan ini dapat diamati dari kemampuan pengorganisasian dalam memberikan perannya untuk suatu kegiatan. Partisipasi dalam pelaksanaan berkaitan erat dengan bagaimana cara organisasi yang terdapat di desa tersebut mampu menggerakkan aktivitas dan masyarakatnya untuk ikut serta berpartisipasi dalam segala pelaksanaan kegiatan yang terdapat di desa.

Berdasarkan pendapat Josef dalam penelitian-penelitian tersebut, gejala dari Partisipasi dalam Pelaksanaan dapat disimpulkan, seperti adanya tingkat kontribusi langsung dan tidak langsung masyarakat dalam pengembangan, eksistensi pemeliharaan pembangunan maupun program yang telah berhasil dilaksanakan, dan kemampuan pengorganisasian dalam menampung aksi masyarakat.

b. Partisipasi dalam Pengambilan Manfaat

Josef Riwu Kaho (2007) mengemukakan bahwa partisipasi dalam pengambilan manfaat merupakan perwujudan dari hasil pelaksanaan kegiatan atau program yang bisa tercapai, baik secara kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas, keberhasilan suatu kegiatan dilihat dari sebagaimana masyarakat dapat memanfaatkan keuntungan dari adanya

suatu kegiatan, sedangkan dari segi kuantitas dapat diketahui dari besar persentase keberhasilan program, dilihat dari target yang telah ditetapkan, apakah sesuai dengan target, kurang dari target, atau melebihi target.

Josef Riwu (dalam Nurhidayah, 2018) di penelitian yang berjudul *Kepemimpinan Kepala Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Kaseralau Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang*, mengemukakan pendapatnya bahwa Partisipasi dalam Pengambilan Manfaat dapat ditinjau dari tingkat kesejahteraan masyarakat desa. Tingkat kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat desa memperlihatkan bahwa masyarakat desa tersebut mampu atau tidak untuk berpartisipasi dalam pengambilan manfaat.

Pendapat Josef Riwu (dalam Dema, Hirman, dkk, 2020) juga diuraikan dalam penelitian yang berjudul *Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan Sumber Daya Manusia di Desa Ongko Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang*, bahwa masyarakat dapat dikatakan turut serta berpartisipasi dalam pengambilan manfaat jika *output* hasil pengembangan maupun pembangunan harus diterima secara merata oleh masyarakat dan pemanfaatan *output* tersebut oleh masyarakat ke hal yang lebih berguna.

Berdasarkan uraian Josef dalam penelitian-penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa gejala dari Partisipasi dalam Pengambilan manfaat adalah tingkatan kesejahteraan masyarakat dan eksistensi *output* yang diterima secara merata oleh masyarakat.

c. Partisipasi dalam Evaluasi

Josef Riwu Kaho (2007) menyatakan bahwa partisipasi dalam evaluasi merupakan keterlibatan masyarakat dalam menilai atau mereview masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Masyarakat akan melihat detail kegiatan yang sudah terlaksana melalui hasil laporan. Masyarakat juga dapat menilai dan mengawasi ketika program sedang berjalan dan menyampaikan hasil penilaian mereka di tahap ini.

Josef Riwu (dalam Adam, Irwan, dkk, 2019) di penelitian yang berjudul Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, menguraikan pendapatnya mengenai partisipasi dalam evaluasi, bahwa tinjauan partisipasi dalam evaluasi dapat diamati dari masalah yang terjadi pada saat pelaksanaan program secara menyeluruh. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah program telah sesuai harapan atau ada penyimpangan

Josef Riwu (dalam Irawinne, 2018) di penelitian yang berjudul Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Budaya Lokal Tembang Macapat pada Program Siaran Radio Komunitas Angkringan Yogyakarta juga memaparkan pendapatnya bahwa partisipasi dalam evaluasi dapat dilihat dengan adanya tingkat kemampuan masyarakat untuk memberikan kritik dan saran usai program dilaksanakan. Pasalnya karena tidak semua masyarakat pasti berkontribusi dalam memberikan kritik dan saran mereka dalam forum maupun proses evaluasi yang dilakukan di desa.

Hal ini memberikan simpulan bahwa gejala dari Partisipasi dalam Partisipasi dalam Evaluasi ialah mengevaluasi program telah sesuai harapan atau ada penyimpangan, serta tingkat kemampuan masyarakat memberikan kritik dan saran usai program dilaksanakan.

Tabel 1.11 Matriks Gejala Partisipasi Masyarakat Menurut Josef Riwu Kaho

Fenomena	Gejala	Sub Gejala
Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata	Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan	1. Keikutsertaan masyarakat dalam memberikan aspirasi
		2. Kehadiran masyarakat dalam pertemuan/rapat desa
		3. Kemampuan masyarakat dalam menetapkan skala prioritas.
	Partisipasi dalam Pelaksanaan	1. Kontribusi langsung dan tidak langsung masyarakat dalam pengembangan
		2. Eksistensi pemeliharaan pembangunan maupun program yang telah berhasil dilaksanakan
		3. Kemampuan pengorganisasian desa dalam menampung partisipasi masyarakat
	Partisipasi dalam Pengambilan Manfaat	1. Kesejahteraan masyarakat
		2. Eksistensi <i>output</i> yang diterima secara merata dan pemanfaatan output oleh masyarakat
	Partisipasi dalam Evaluasi	1. Mengevaluasi masyarakat terhadap harapan dan ketercapaian tujuan
		2. Kemampuan masyarakat memberikan kritik dan saran usai program dilaksanakan.

Dari beberapa definisi dan tabel gejala di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan seseorang ataupun sekelompok baik dalam bentuk fisik, materi, mental, maupun emosial yang akan

mendatangkan kontribusi yang membantu dalam pelaksanaan program maupun keputusan-keputusan yang akan ditetapkan. Sehingga tujuan dari partisipasi itu sendiri yaitu untuk mencapai target suatu program maupun meningkatkan kesejahteraan bersama.

1.6.7. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Partisipasi Masyarakat

Penerapan partisipasi masyarakat dalam suatu kegiatan maupun program tentunya dapat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh (Imron : 2005), mengenai faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat yang terbagi menjadi faktor internal dan eksternal.

Penerapan suatu program maupun keputusan yang sudah disusun dan ditetapkan sedemikian rupa merupakan hal yang sering dijumpai pada pengelolaan di kehidupan sehari-hari. Kebijakan maupun kegiatan yang sudah diputuskan tentunya telah sesuai prosedur hingga dapat mencapai target yang diekspektasikan. Dalam penerapannya, tentunya dibarengi dengan keterlibatan partisipasi masyarakat agar pengelolaan suatu kegiatan berjalan lebih baik dan maksimal. Tentunya ada faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam partisipasi masyarakat baik itu faktor pendukung maupun faktor penghambat menurut (Imron : 2005), yaitu :

1. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang lahir dari dalam suatu masyarakat. Partisipasi yang terjadi dapat dipengaruhi oleh adanya faktor-faktor dari lingkungan sekitar yang masih bersifat internal di sekeliling masyarakat atau tempat tersebut, yaitu :

- Pengetahuan dan keahlian

Pengetahuan dan keahlian yang dimiliki masyarakat tentunya dapat memengaruhi partisipasi yang dilaksanakan. Pengetahuan dan keahlian yang baik akan menciptakan partisipasi masyarakat yang lebih maju.

- Keinginan dalam diri masyarakat itu sendiri

masyarakat tentunya memiliki rasa sukarela atau kemauan yang mendorong mereka berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan Sebagian tertentu.

- Mata pencaharian masyarakat

Mata pencaharian masyarakat tentunya beragam dan hal ini dapat memengaruhi proses partisipasi yang mereka lakukan karena masing-masing pekerjaan memiliki *skill* dan waktu luang yang berbeda-beda.

- Pendidikan

Tingkat pendidikan yang rendah dan tinggi memiliki dampak pada masing-masing individu mulai dari cara pola pikir dan bertindak, sehingga hal ini juga berdampak pada keberjalanan partisipasi pada suatu kegiatan.

- Jenis kelamin

Adanya pria dan wanita tentunya memiliki kemahiran pada bidangnya masing-masing yang tentunya ini dapat dituangkan pada proses partisipasi.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal jika dikaitkan dengan partisipasi masyarakat dapat dipengaruhi oleh berbagai pihak yang mempengaruhi suatu pembangunan maupun program tersebut. Selain faktor internal, adanya suatu partisipasi tentunya dapat dipengaruhi oleh pihak-pihak luar yang turut bercampur tangan, seperti :

- Stakeholders

Stakeholder tentunya berpengaruh pada setiap kegiatan yang ada, khususnya keberjalanan partisipasi di suatu wilayah karena stakeholder merupakan sekelompok orang yang memiliki wewenang lebih besar pada suatu kegiatan serta merupakan wadah untuk menampung aspirasi dan penyediaan sumber daya manusia.

- Media massa

Media massa merupakan tempat informasi dan komunikasi berbagai orang, sehingga adanya media massa ini dapat memengaruhi partisipasi masyarakat dan opini masyarakat terkait suatu kegiatan.

1.6.8. Pengembangan Desa Wisata

Pengembangan berasal dari kata kerja “berkembang” yang berarti mekar terbuka, menjadikan besar, menjadikan maju. Dalam hal ini, pengembangan adalah membuat atau mengadakan atau mengatur sesuatu untuk menjadi lebih baik. Pengembangan merupakan suatu proses, cara, perbuatan menjadikan sesuatu menjadi lebih baik, maju, sempurna dan berguna (Alwi Hasan dkk, 2005:269). Pengembangan merupakan suatu proses/aktivitas memajukan sesuatu yang dianggap perlu untuk ditata sedemikian rupa dengan meremajakan atau memelihara yang sudah berkembang agar menjadi lebih menarik dan berkembang.

Pengembangan adalah suatu sistem pembelajaran yang bertujuan untuk membantu proses belajar peserta didik, yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar yang

bersifat internal atau segala upaya untuk menciptakan kondisi dengan sengaja agar tujuan pembelajaran dapat tercapai (Gagne dan Brings, 2003: 266).

Menurut Yoeti (2008), alasan utama pengembangan Desa Wisata pada suatu daerah tujuan wisata, baik secara lokal, regional atau ruang lingkup nasional pada suatu negara sangat erat kaitannya dengan pembangunan perekonomian daerah atau negara tersebut. Menyadari bahwa bila pada suatu daerah tujuan wisata industri pariwisatanya berkembang dengan baik dengan sendirinya akan memberikan dampak positif bagi daerah itu, karena itu dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang luas bagi penduduk setempat.

Sobari (dalam Anindita, 2015) mengungkapkan bahwa pengembangan desa wisata harus dilakukan secara ideal dan didasarkan oleh 4 prinsip-prinsip dasar, seperti :

- a. Keberlangsungan ekologi, bahwa dalam mengembangkan pariwisata harus disertai dengan pencagaan maupun memproteksi sumber daya alam yang ada di sekitar maupun yang menjadi objek daya tarik wisatawan, seperti hutan, danau, pantai, laut, gunung, dan lain sebagainya.
- b. Keberlangsungan sosial budaya, bahwa mengembangkan pariwisata haruslah disertai dengan melestarikan jiwa sosial maupun budaya dengan mendorong keterlibatan masyarakat untuk mengawasi tata kelola kehidupan dengan sistem norma yang sudah ditetapkan di masyarakat lokal sebagai budaya maupun identitas mereka.
- c. Keberlangsungan ekonomi, dengan berkembangnya pariwisata seharusnya terdapatlah kesempatan kerja maupun pembukaan lapangan kerja yang lebih

luas bagi bermacam pihak agar pariwisata yang ada pun semakin berkembang dan kompetitif dengan dibarengi oleh kesejahteraan perekonomian masyarakat setempat.

- d. Pengembangan pariwisata juga harus disertai dengan perbaikan maupun peningkatan kualitas hidup masyarakat lokal. Dengan begitu, perlu digencarkan kembali bahwa masyarakat juga harus berperan aktif dalam mengembangkan pariwisata.

Didasari oleh pengertian di atas mengenai pengembangan desa wisata, dapat di artikan bahwa pengembangan desa wisata ialah suatu fenomena yang terjadi dengan bersifat kompleks nan multisektoral. Pengembangan desa wisata juga merupakan suatu proses untuk menuju kemajuan suatu desa agar lebih baik dan berkualitas demi tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

1.7. Kerangka Pemikiran Teoritis

Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Lerep

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 menyatakan desa wisata mempunyai peranan penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Terwujudnya pengembangan yang baik bagi Desa Wisata Lerep Ungaran tentunya memerlukan partisipasi masyarakat yang mendukung.

Fakta

1. Belum optimalnya keterlibatan masyarakat untuk memberikan kontribusi dalam rapat perencanaan kegiatan pengembangan Desa Wisata Lerep.
2. Kurangnya sumbangsih swadaya masyarakat berupa tenaga dan materi dalam mengembangkan wisata yang terdapat di Desa Wisata Lerep.
3. Kontribusi masarakat belum maksimal dalam memanfaatkan hasil pengembangan Desa Wisata Lerep.
4. Kurang optimalnya masyarakat dalam memberikan penilaian yang membangun mengenai pembangunan Desa Wisata Lerep.
5. Menurunnya jumlah wisatawan Desa Wisata Lerep tiap tahunnya .

Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Lerep?

Mendiskripsikan partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Lerep

Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Lerep

Partisipasi Masyarakat (Josef Riwu Kaho, 2007) :

- 1) Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan
- 2) Partisipasi dalam Pelaksanaan
- 3) Partisipasi dalam Pengambilan Manfaat
- 4) Partisipasi dalam Evaluasi

Faktor Internal dan Faktor Eksternal (Imron, 2005) :

- 1) Faktor Internal
- 2) Faktor Eksternal

Rekomendasi

1.8.Operasionalisasi Konsep

1.8.1. Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Lerep

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Lerep adalah suatu bentuk keterlibatan masyarakat dalam upaya pengembangan desa wisata dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat. Partisipasi masyarakat ini dapat dilakukan dengan melakukan beberapa usaha dalam mengembangkan lokasi agar lebih baik lagi, pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengambilan manfaat, hingga evaluasi. Keikutsertaan atau keterlibatan masyarakat dalam pengembangan desa wisata yang dimaksud di sini dapat dilakukan secara aktif maupun pasif. Partisipasi masyarakat ini terbagi menjadi :

1. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

Partisipasi dalam pengambilan keputusan merupakan upaya individu atau masyarakat dalam berkontribusi melalui proses pengambilan keputusan yang berupa penyampaian ide atau aspirasinya dalam suatu pertemuan atau kegiatan di Desa Wisata Lerep untuk mencapai keputusan yang lebih baik dan adil.

2. Partisipasi dalam Pelaksanaan

Partisipasi dalam melaksanakan adalah keterlibatan individu maupun masyarakat dalam proses pelaksanaan suatu kegiatan maupun program yang terdapat di Desa Wisata Lerep. Partisipasi dalam pelaksanaan ini dapat berupa pemberian tenaga maupun materi demi menjalankan pengembangan desa wisata yang lebih baik.

3. Partisipasi dalam Pengambilan Manfaat

Partisipasi dalam pengambilan manfaat merupakan keterlibatan individu atau masyarakat dalam memanfaatkan hasil atau keuntungan dari adanya kegiatan di Desa Wisata Lerep. Partisipasi pengambilan manfaat ini juga memastikan bahwa masyarakat dapat menerima dampak baik dari adanya keuntungan pengembangan Desa Wisata Lerep secara merata.

4. Partisipasi dalam Evaluasi

Partisipasi dalam evaluasi merupakan kontribusi individu atau masyarakat dalam memberikan penilaian atau mengevaluasi suatu kegiatan maupun program yang ada di Desa Wisata Lerep. Adanya proses evaluasi dari masyarakat ini pun akan meningkatkan kualitas dari terselenggaranya kegiatan di Desa Wisata Lerep.

Tabel 1.12 Operasionalisasi Konsep

Fenomena	Gejala	Sub Gejala	Informan						
			1	2	3	4	5	6	7
Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Lerep	Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan	1. Keikutsertaan masyarakat dalam memberikan aspirasi	✓	✓	✓	✓	✓		
		2. Kehadiran masyarakat dalam pertemuan/rapat desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		3. Kemampuan masyarakat dalam menetapkan skala prioritas.	✓	✓	✓	✓	✓		
		1. Kontribusi langsung dan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Fenomena	Gejala	Sub Gejala	Informan						
			1	2	3	4	5	6	7
	Partisipasi dalam Pelaksanaan	tidak langsung masyarakat							
		2. Eksistensi pemeliharaan pembangunan maupun program yang sedang berjalan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		3. Peran organisasi desa dalam pengembangan	✓	✓	✓	✓	✓		
	Partisipasi dalam Pengambilan Manfaat	1. Kesejahteraan masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓		
		2. Eksistensi <i>output</i> yang diterima secara merata dan pemanfaatan <i>output</i> oleh masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Partisipasi dalam Evaluasi	1. Mengevaluasi pengembangan telah sesuai harapan atau ada penyimpangan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2. Kemampuan masyarakat memberikan kritik dan saran usai pengembangan dilaksanakan.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Keterangan Informan :

- 1) Masyarakat Desa Wisata Lerep Ungaran
- 2) Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)
- 3) Kepala desa dan segenap aparat Desa Wisata Lerep Ungaran
- 4) Ketua BUMDES Desa Lerep
- 5) Ketua Karang Taruna Desa Lerep

- 6) Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang
- 7) Masyarakat Luar (Pengunjung Desa Wisata Lerep)

1.8.2. Faktor-faktor yang Memengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Lerep

Faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Lerep adalah suatu keadaan yang menjadi penyebab terjadinya partisipasi tersebut akan dilakukan. Faktor-faktor ini dapat menimbulkan semacam minat masyarakat Desa Wisata Lerep untuk turut serta berpartisipasi dalam pengembangan desa wisata, dimana faktor ini dibagi menjadi dua yaitu faktor internal yang merupakan faktor dari diri masyarakat itu sendiri dan faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari pihak luar masyarakat.

Tabel 1.13 Operasionalisasi Konsep

Fenomena	Sub Gejala	Gejala	Informan						
			1	2	3	4	5	6	7
Faktor-faktor yang Memengaruhi Partisipasi Masyarakat	Faktor Internal	1. Pengetahuan dan keahlian	✓	✓	✓	✓	✓		
		2. Keinginan dalam diri masyarakat itu sendiri	✓	✓	✓	✓	✓		
		3. Mata pencaharian masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓		
		4. Tingkat pendidikan	✓	✓	✓	✓	✓		
		5. Jenis kelamin	✓	✓	✓	✓	✓		
	Faktor Eksternal	1. Stakeholders	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		2. Media Massa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Keterangan Informan :

- 1) Masyarakat Desa Wisata Lerep Ungaran
- 2) Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)
- 3) Kepala desa dan segenap aparat Desa Wisata Lerep Ungaran
- 4) Ketua BUMDES Desa Lerep
- 5) Ketua Karang Taruna Desa Lerep

- 6) Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang
- 7) Masyarakat Luar Pengunjung Desa Wisata Lerep)

1.9. Argumen Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah di atas, penelitian ini awalnya didasari oleh rasa keingintahuan peneliti mengenai partisipasi masyarakat yang dilakukan untuk mengembangkan Desa Wisata Lerep, dimana peneliti akan menganalisis apa yang menyebabkan keterlibatan masyarakat masih rendah hingga faktor-faktor yang memengaruhi keterlibatan mereka. Hal tersebut didukung oleh pertanyaan dari Juliantara (2002: 89-90), bahwa partisipasi masyarakat penting dilakukan karena partisipasi merupakan suatu kebutuhan dalam proses kegiatan yang di dalamnya memungkinkan masyarakat yang secara mandiri mengorganisasi diri dan dapat mengatasi situasi sulit maupun dinamika dalam pembangunan di wilayahnya. Namun berdasarkan data yang diperoleh, nyatanya masih terdapat beberapa permasalahan yang bermunculan, mulai dari masyarakat desa wisata itu sendiri, hingga tidak keakuratan informasi di media dengan keadaan asli desa tersebut.

Disebutkan bahwa Desa Wisata Lerep merupakan salah satu desa wisata terpopuler dengan pengunjung terbanyak. Namun, pada kenyataannya keterlibatan masyarakat masih kurang baik salah satunya pada kurang optimalnya paket wisata yang mereka promosikan dan masih banyak masyarakat lainnya yang belum mengetahui adanya Desa Wisata Lerep. Pengunjung desa tersebut ternyata hanya didominasi oleh masyarakat berusia 30 tahun ke atas, serta minim kunjungan dari para pelajar hingga mahasiswa. Terlebih pada saat masa pandemi, beberapa

destinasi wisata di Desa Wisata Lerep sempat ditutup sehingga saat masa pemulihannya Desa Wisata Lerep masih memiliki jumlah pengunjung yang menurun. Peneliti menganggap hal ini patut diteliti karena saling berkaitan mengenai permasalahan partisipasi masyarakat yang kompleks dan belum terjawab dengan saksama di penelitian-penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti mengambil teori partisipasi masyarakat dan gejala dari Josef Riwu Kaho dengan dilengkapi oleh teori faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat dari Imron untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam pengembangan dengan lokus yaitu di Desa Wisata Lerep untuk mengkaji bagaimana partisipasi yang terjadi.

1.10. Metode Penelitian

1.10.1. Tipe Penelitian

Pendekatan penelitian adalah pedoman pengumpulan data dan kegunaan tertentu melalui cara-cara yang sifatnya ilmiah (Sugiyono, 2012:2). Macamnya terdiri dari pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2012:9) pendekatan kualitatif adalah penggunaan metode untuk mengetahui keadaan objek yang bersifat alamiah, dimana instrumen kuncinya peneliti sendiri, mengumpulkan data melalui triangulasi, menganalisis data yang bersifat kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan kepada arti tertentu. Sedangkan pendekatan kuantitatif adalah penelitian yang memiliki populasi atau sampel yang diteliti, instrumen penelitian sebagai bentuk dari pengumpulan data, bersifat kuantitatif/statistik pada analisis data, dan melakukan pengujian hipotesis yang sudah ditentukan (Sugiyono, 2012:8).

Adanya pendekatan penelitian tentunya di dalamnya terdapat tipe penelitian yang merupakan cara peneliti dalam menyampaikan risetnya. Menurut (Pasolong, 2016:75) terdapat 3 tipe penelitian, yaitu :

1. Penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan melalui deskripsi, catatan, analisis, dan interpretasi mengenai apa yang terjadi pada saat dilakukannya penelitian.
2. Penelitian eksploratif, yaitu penelitian yang sifatnya tidak tertutup, masih melakukan pencarian dan hipotesis belum dimiliki, serta masih kurangnya pemahaman penelitian mengenai kejadian yang akan diteliti. Masalah penelitian dapat diidentifikasi lebih jelas serta terinci melalui eksploratif.
3. Penelitian eksplanatori (penjelsan), yaitu penelitian yang melihat hubungan antar variabel penelitian dan melakukan pengujian hipotesis *testing research*.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan maksud memberikan hasil dari data deskriptif yang berisikan kalimat-kalimat tertulis maupun secara ucapan (lisan) dari masyarakat, perilaku, hingga kondisi yang terjadi yang tentunya dapat diamati. Penelitian kualitatif akan menjelaskan data yang berkaitan dengan situasi maupun masalah yang ada, seperti adanya ketidaksesuaian pelaksanaan dengan rencana, pertentangan antara 2 situasi atau lebih, kondisi yang tidak sesuai dengan kenyataannya, dan lain sebagainya. Adanya penelitian kualitatif ini memiliki tujuan untuk memperjelas fakta, maupun mengungkapkan keadaan yang terjadi di lapangan dengan apa adanya,

terlebih untuk mengkaji lebih dalam lagi perihal partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Lerep Ungaran.

1.10.2. Situs Penelitian

Menurut Sukmadinata (2009:53-60), situs penelitian merupakan topik atau fokus yang ingin dibahas pada penelitian. Fokus penelitian kali ini yaitu Partisipasi Masyarakat. Partisipasi masyarakat di sini dikaitkan dengan pengembangan yang terdapat pada lokus penelitian agar menjadi judul penelitian yang berkesinambungan antara fokus dan lokus penelitian. Dengan adanya fokus, tentunya terdapat lokus atau yang biasa disebut dengan setting tempat yang menjadi lokasi untuk penelitian. Peneliti mengambil lokus pada Desa Wisata Lerep Ungaran yang terletak di Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dengan memiliki pertimbangan bahwa lokus yang diambil sangat sesuai dengan fokus yang akan diteliti dengan beberapa permasalahan yang ada di dalamnya.

1.10.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dapat disebut dengan 'informan', dimana informan ini akan memberitahukan berbagai informasi maupun situasi yang dapat membantu peneliti untuk melaksanakan penelitiannya yang tentunya masih berkesinambungan dengan gagasan yang akan dibahas (Arikunto, 2016 : 12). Informan atau subjek penelitian yang akan diwawancarai maupun diteliti disesuaikan dengan sejumlah replikasi situasi maupun fenomena untuk mengkaji informasi yang sesuai dengan topik penelitian.

Subjek penelitian diambil berdasarkan beberapa informan kunci dengan teknik penentuan informan yang telah ditetapkan, salah satunya *purposive sampling*. Menurut (Sugiyono, 2016:216), teknik *purposive sampling* merupakan teknik untuk mengambil sumber data penelitian dengan mengambil informan yang sesuai konteks penelitian.

Pemilihan informan penelitian ini menggunakan teknik *purposive* atau informan yang terpilih. Teknik *purposive* merupakan teknik yang digunakan untuk memilih informan secara khusus dipilih oleh peneliti dengan tujuan penelitian yang dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan partisipasi dalam pengembangan Desa Wisata Lerep sehingga informan yang dipilih menggunakan teknik *purposive* bertujuan agar peneliti dapat menemukan informan yang tepat untuk dilakukan wawancara sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.

Informan yang ditetapkan untuk meneliti partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Lerep Ungaran, dipaparkan pada tabel berikut :

Tabel 1.14 Informan Penelitian

No.	Informan Penelitian	Jumlah Informan
1.	Masyarakat Desa Lerep	3 orang
2.	Ketua Pokdarwis Desa Wisata Lerep	1 Orang
3.	Kepala Desa Lerep	1 Orang
4.	Ketua BUMDES Desa Lerep	1 Orang
5.	Ketua Karang Taruna Desa Lerep	1 Orang
6.	Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang	1 Orang
7.	Masyarakat Luar (Pengunjung Desa Wisata Lerep)	1 Orang
Jumlah		9 Orang

1.10.4. Jenis dan Sumber Data

Pengumpulan data ataupun jenis data yang dilakukan berupa data yang berbentuk dengan kalimat atau biasa disebut data deskriptif, dalam penelitian kualitatif. Seperti yang diungkapkan oleh Nasution (dalam Prasto, 2012:43), menyatakan bahwa penelitian kualitatif mengupayakan meneliti dengan mengumpulkan data deskriptif yang disesuaikan dengan kebutuhan peneliti yang nantinya dapat dituangkan dalam bentuk uraian maupun laporan, sehingga penelitian yang dihasilkan tidak berupa banyaknya angka-angka meskipun pada pengumpulan datanya tetap mencari data yang signifikan seperti grafik, tabel, diagram, dan data-data valid lainnya untuk melengkapi suatu permasalahan maupun penjelasan yang terdapat di Desa Wisata Lerep Ungaran.

- Data Primer

Menurut Nasution (dalam Jayandri, 2010), data primer yang diperoleh ialah data yang dikumpulkan melalui sumber penelitian secara langsung. Data primer ini mempunyai karakteristik bersifat *up to date*, ataupun data terbaru karena datang langsung dari subjek penelitian. Penelitian kali ini menggunakan data primer yang didapatkan peneliti berasal dari hasil wawancara yang dilakukan, seperti menyebarkan pertanyaan ke beberapa informan terkait partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Lerep. Selain itu, peneliti nantinya juga dapat melakukan observasi di Desa Wisata Lerep.

- Data Sekunder

Menurut Nasution (dalam Jayandri, 2010), data sekunder merupakan sumber data yang didapatkan dari adanya studi pustaka maupun sumber literatur yang berkesinambungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder yang

nantinya akan dipakai untuk menjadi bahan maupun pelengkap penelitian kali ini ialah data sekunder yang berupa tinjauan pustaka, data statistik, jurnal, buku, laporan, artikel berita, hingga data-data lainnya yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dan nantinya akan didapatkan proses penelitian di Desa Wisata Lerep Ungaran.

1.10.5. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Ridwan (2010 : 51) teknik pengumpulan data merupakan perlakuan atau cara-cara peneliti untuk mengumpulkan data sesuai kebutuhan penelitian. Demi mendapatkan kelengkapan data untuk menunjang kepentingan penelitian, maka terdapat beberapa teknik pengumpulan data untuk melakukan penelitian ini, sebagai berikut :

1) Observasi

Dalam bahasa inggris, '*observation*' mengandung arti yang sama dari kata 'observasi'. Menurut Ridwan (2011), observasi merupakan metode penelitian yang pelaksanaannya dilakukan dengan mengamati dengan saksama lalu mulai mencatat dengan sistematis bagaimana fenomena/kejadian, kegiatan, hingga perilaku seseorang maupun kelompok yang ingin diteliti. Peneliti melakukan observasi dengan berbagai kegiatan, seperti mengamati aktivitas masyarakat, ikut berdiskusi perihal pengembangan desa wisata, sosialisasi, serta mulai mencatat dengan saksama hasil dari observasi di Desa Wisata Lerep Ungaran tersebut. Observasi ini tentunya bersifat alami (*natural condition*).

2) Wawancara

Menurut Menurut Ridwan (dalam Niuhidin, 2011), wawancara dapat disebut dengan teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan dengan cara melakukan proses tanya jawab secara langsung maupun tatap muka. Penelitian kali ini melakukan wawancara dengan cara tatap muka dan memberikan berbagai pertanyaan pada informan. Dengan begitu, peneliti akan mendapatkan data secara menyeluruh mengenai beberapa fakta, pendapat, pandangan, maupun jawaban-jawaban lengkap dari informan.

3) Dokumentasi

Menurut Ridwan (2011) dokumentasi memiliki arti bahwa adanya suatu gambar maupun catatan yang tertulis yang sebenarnya sudah pernah terjadi. Dokumentasi ini berisikan data maupun fakta yang telah tersimpan dengan beragam bentuk maupun bahan yang berakhir dengan istilah dokumentasi. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan foto, video, biografi, catatan harian, peraturan, laporan, SOP, dan hal-hal lainnya yang dapat disimpan. Ruang dan waktu pun tidak membatasi adanya dokumen ini, sehingga peneliti dapat dipermudah dengan adanya dokumentasi tersebut karena dapat mengetahui sesuatu yang sudah terjadi sebelumnya sebagai pendukung data wawancara dan observasi demi mendorong keaslian maupun keabsahan data.

1.10.6. Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data ialah perlakuan untuk memecahkan data menjadi beberapa unsur yang lebih kecil dengan didasari oleh struktur dan elemen tertentu. Menurut Bogdan dan Biglen (dalam Moleong, 2004), analisis data pada

penelitian kualitatif merupakan bentuk usaha yang dilaksanakan untuk mengkoordinir data, merincikan, mengolah, mencari, hingga menemukan pola yang penting untuk dipelajari dan nantinya akan diputuskan untuk dipaparkan kepada orang lain.

Pada penelitian partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Lerep ini, teknik analisis data yang dipakai yaitu mencakup transkrip wawancara, reduksi data, penyajian data yang akurat, hingga penarikan kesimpulan. Dengan kelengkapan penelitian tersebut, nantinya peneliti dapat menarik kesimpulan yang tepat. Pada analisis data kali ini, tentunya didasari oleh penyederhanaan serta interpretasi data yang dilakukan sebelum, selama meneliti, hingga setelah proses pengumpulan data. Sehingga, metode analisis data pada penelitian kali ini yaitu :

- Reduksi Data

Menurut Bogdan & Biklen (Lexy J Moleong, 2010: 248), data yang direduksi artinya melakukan perangkuman, memilah hal-hal yang bersifat penting, mencari tema maupun pola yang ada, serta membuang hal-hal yang dirasa tidak penting. Hasil dari reduksi data nantinya akan berupa data yang akurat, penting, dan sederhana berdasarkan pengkajian semua data yang diperoleh saat meneliti di lapangan. Data yang diperoleh di Desa Wisata Lerep akan mengerucut hingga dapat diarahkan kepada inti permasalahan maupun fenomena yang nantinya dapat mengarahkan lebih jelas ke arah objek penelitian.

- Penyajian Data

Menurut Miles dan Huberman (dalam Muhammad Idrus, 2016), menyatakan bahwa data yang disajikan ataupun penyajian data merupakan deretan ataupun kumpulan informasi yang telah terstruktur, sehingga nantinya dapat disajikan dengan akurat. Penyajian data dalam penelitian partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Lerep ditujukan untuk mengetahui komponen-komponen tertentu dalam suatu penelitian. Di tahap inilah peneliti nantinya menyajikan data yang berkesinambungan dengan pokok permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menampilkan hasil dari reduksi data dalam uraian singkat, dapat pula dengan menggunakan diagram, grafik, tabel, dan pelengkap lainnya. Penyajian data ini menjadi langkah untuk memungkinkan peneliti menarik kesimpulan.

- Menarik Kesimpulan

Menurut Miles dan Huberman (2013) penarikan kesimpulan ialah tahapan terakhir dalam pelaksanaan analisis data. Penarikan kesimpulan juga dimaksudkan untuk menggali maksud dari data yang diperoleh maupun mencari hubungan persamaan hingga perbedaan dari data yang didapatkan dan fakta yang terjadi di Desa Wisata Lerep Ungaran. Penarikan kesimpulan ini juga diambil dari intisari observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1.10.7. Kualitas Data atau Validitas Data

Dalam penelitian kualitatif, kualitas maupun validitas data yang ada merupakan hal yang sangatlah penting karena dapat memengaruhi penelitian hingga akhir (Sugiyono, 2003). Kualitas data yang absah dalam suatu penelitian

ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber ini memiliki tujuan agar data yang didapatkan merupakan data yang kredibel. Penelitian partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Lerep menempuh triangulasi menggunakan bahan referensi, seperti mencari data lainnya untuk mendukung data yang sudah diperoleh sebelumnya, seperti data transkrip wawancara yang dibuktikan dengan terdapatnya rekaman ataupun video hasil wawancara. Selain itu, dapat juga dilakukan dengan menjelaskan referensi pada jurnal maupun buku-buku yang digunakan peneliti untuk membantu mencari wawasan akan penelitian yang dilakukan. Lalu peneliti juga melakukan wawancara dengan berbagai sumber agar pernyataan yang diterima tidak misskonsepsi karena sumber-sumber yang diteliti jelas.